

B

LEGISLATIF DAERAH DAN MASALAH PERTANAHAN

(Studi Deskriptif Peran DPRD Kotamadya TK II Surabaya dalam Penyelesaian Masalah Kebun Bibit)

SKRIPSI

KK

Fis . p. 8 / 99

Azi

2 .



WILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Disusun oleh :

LILIK AZIZAH

NIM. 079414293

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GASAL 1998/1999**

Lembar pengesahan

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan para penguji
tanggal 7 Januari 1999

Panitia penguji terdiri dari

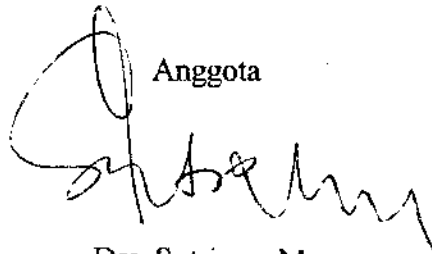
Ketua



Drs. Priyatmoko, MA

Nip. 130 937 925

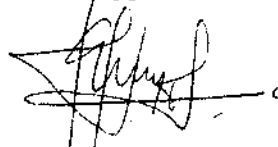
Anggota



Drs. Sutrisno, Ms

Nip. 130 937 951

Anggota



Dra. Dwi Windyastuty BH, Ms

Nip. 131 801 643

ABSTRAK

Legislatif daerah sebagai lembaga perwakilan yang ada di daerah, pada dasarnya berfungsi sebagai wadah aspirasi dan wakil rakyat harus berhadapan dengan mekanisme dan struktur pemerintah daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang pada intinya menyebabkan posisi legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan adanya kecenderungan hal tersebut, dipengaruhi oleh integritas dan kemampuan anggota dewan dan struktur pemerintahan daerah dan struktur dewan itu sendiri yang merupakan kerangka formal bagi lembaga legislatif dalam bertindak sebagai wakil rakyat. Sedangkan pelaksanaan hak yang dimiliki dewan dalam menjalankan fungsinya ini tergantung pada individu masing-masing anggota. Jadi dikembalikan lagi pada kesadaran dari anggota untuk menggunakan haknya sebagai wakil rakyat meskipun secara struktural (Tatib) jelas mempersulit penggunaan hak-hak tersebut.

Dari kondisi diatas, legislatif daerah dalam menjalankan perannya menyelesaikan masalah pertanahan hanya bersifat formalitas artinya dewan hanya bisa mengkaji ulang keputusan-keputusan dan perjanjian yang telah dibuat, dan sebagai lembaga yang mengesahkan dari beberapa perubahan peruntukan tanah yang diajukan eksekutif. Disebabkan adanya ambivalensi peran legislatif daerah yaitu disamping sebagai wakil rakyat juga sekaligus sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Hal tersebut menyebabkan posisi legislatif daerah masih berada dibawah eksekutif, sehingga kritik kurang berfungsinya legislatif daerah masih dirasakan yaitu belum terserapnya semua aspirasi rakyat di daerah.